

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Pengantar

Pada bab tiga ini, penulis mengawali pembahasan mengenai definisi kemanusiaan perspektif Indonesia. Definisi kemanusiaan dibagi dua masa yaitu pertama, masa Hindu-Budha, dan Islam, dan kedua, masa Hindia-Belanda. Tujuan pemaparan definisi untuk menggali pemahaman kemanusiaan para pemikir Indonesia sebelum masa Sukarno. Pemahaman penulis tentang tema sejarah kemerdekaan merupakan suatu peristiwa dan usaha keluar dari belenggu kekuasaan asing.

Cita-cita kemerdekaan tercatat sebagai peristiwa sejarah khusus bagi bangsa Indonesia. Penjelasan tentang tema ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana dengan kemanusiaan Indonesia pada masa ini? Bagaimana bentuk perjuangan rakyat pada masa ini? Apa motif perjuangan rakyat masa ini?. Bagian akhir bab tiga, penulis memaparkan ide kemanusiaan Sukarno ke dalam tiga tema, yaitu kemanusiaan dalam konsep *'freiheit'*, kemanusiaan dalam religius etik, dan kemanusiaan dalam sosio-nasionalisme. Ide Pancasila Sukarno dalam dua tema, yaitu pertama, Pancasila 1 Juni 1945; kedua, Pancasila sebagai alat pemersatu.

3.2. Definisi Kemanusiaan Perspektif Indonesia

3.2.1. Masa Hindu-Buddha, dan Islam

Mpu Kanwa (abad ke-11), penyair istana pada pemerintahan Raja Airlangga (1009-1042). Kanwa memahami manusia lewat *tapa-brata*. Kesatuan dan kesejahteraan manusia

dengan melaksanakan dharma *tapa-brata*. **Mpu Tantular (abad ke-14)**, pada pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389). Tantular memahami manusia melalui ungkapan *Bhineka Tunggal Ika* (kesatuan dalam perbedaan). **I La Galigo Arung Pancana Toa (abad ke-13)**, memahami manusia berdasarkan kisah asal-usul manusia turun dari dewa langit dan dewa bumi untuk menduduki bumi. Karya Galigo menjadi filsafat hidup masyarakat bugis (Sulawesi Selatan). **Hamzah al-Fansuri (abad ke-16)**, ulama sufi dan sastrawan berdiam di Aceh. Beliau memahami manusia dengan jalan penyatuan terhadap al-Khalik dan menemuinya di jalan kasih Allah. **Yasadipura (1729-1830)**, memahami manusia dalam makrokosmos dan mikrokosmos sesuai tradisi mistik Jawa. Perjuangan manusia melawan kejahatan sebagai upaya mencapai kesempurnaan.

3.2.2. Masa Hindia-Belanda

Ranggawarsita (1802-1873), memahami manusia sebagai gabungan empat unsur: tanah, api, udara, dan air. **Ki Hajar Dewantara (1889-1958)**, memahami kemanusiaan berdasarkan kebebasan. Kehidupan nasional berorientasi pada dasar humanisme. Filsafat pendidikannya menunjang pluralisme budaya sebagai hak dasar manusia. **Soekarno (1901-1971)**, memahami manusia dalam orientasi sosialisme Indonesia dengan empat ciri, yaitu: pertama, pandangan dunia adalah pengolahan dari nilai-nilai budaya bangsa; kedua, kesatuan nasional mengatasi perbedaan kebudayaan daerah; ketiga, Marxisme menjadi pisau analisis realitas bangsa terjajah; dan keempat, kehidupan religius merupakan kenyataan konkret darah-dagang masyarakat Indonesia.

Nicolaus Driyarkara (1913-1967), empat gagasan tentang manusia bahwa pertama, manusia adalah individu, kesatuan yang meneguhkan diri; kedua, manusia hadir di dunia, dan

membentuk dunia berkelanjutan; ketiga, sosialitas merupakan suatu eksistensial; dan keempat, manusia merupakan makhluk historis mengalami evolusi secara dialektik.¹

3.3. Kemanusiaan Konteks Indonesia abad ke-19

Menurut Notonagoro, kebutuhan kemanusiaan Indonesia adalah kebutuhan religius, nasional, internasional, kerakyatan (demokrasi), keadilan di lingkungan sosial ekonomi, dan di lingkungan kejiwaan dalam negara dan masyarakat tanpa proses eksploitasi antar sesama manusia.² Menurut Sunoto, ide kemanusiaan melalui pendekatan sejarah terdapat dari dua hal, yaitu pertama, perjuangan Indonesia melawan penjajah. Perjuangan terlaksana atas nama kemanusiaan. Penjajahan menciptakan eksploitasi manusia antar bangsa, terjadi perampasan, dan pandangan merendahkan martabat manusia. Penjajahan bertentangan dengan kemanusiaan atau hakikat kodrat manusia. Perjuangan bertujuan menemukan kembali nilai-nilai kemanusiaan telah rusak akibat penjajah. Kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki jiwa kemanusiaan secara tersurat dan tersirat karena pada waktu itu bangsa Indonesia memperoleh harkat kemanusiaan yaitu manusia bebas merdeka.³

Kemanusiaan Indonesia adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonagoro, kebutuhan kemanusiaan Indonesia adalah kebutuhan religius, nasional, internasional, kerakyatan (demokrasi), keadilan baik di lingkungan sosial

¹ Toeti Heraty N. Roosseno, *Tentang Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 8-21.

² Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 106.

³ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila (pendekatan melalui sejarah dan pelaksanaannya)*, (Yogyakarta: PT.Hanindita Graha Widya, 1987), 51.

ekonomi, maupun di lingkungan kejiwaan dalam negara dan masyarakat tanpa adanya eksploitasi antar sesama manusia.

3.3.1. Konteks Historiografi Indonesia

Sejarah kemanusiaan kemerdekaan Indonesia mengacu pada perspektif Indonesia-sentris. Kehidupan masyarakat Indonesia sebagai pusat sejarah. Indonesia-sentris berarti bahwa horison sejarah ialah Indonesia. Segala sesuatu berada dalam perspektif keindonesiaan. Pemilihan fakta dan penafsiran fakta-fakta terlaksana di dalam perspektif Indonesia. Masa sejarah Indonesia mengikuti norma ruang-waktu-pelaku dan menghasilkan lukisan sejarah Indonesia sebagai perkembangan ke arah pembentukan Republik Indonesia melalui masa-masa sebagai berikut: pertama, masa perkembangan kekuasaan adat; kedua, masa perkembangan politik; ketiga, masa perebutan hegemoni taraf inter-indonesia; keempat, perebutan hegemoni taraf internasional; kelima, masa *Nederlands-Indie*; dan keenam, masa Republik Indonesia.

Penulisan cerita sejarah Indonesia berada dalam pengaruh paham-paham politik, yaitu politik: mengenai daerah yang disebut *Nederlands-Indie* atau Hindia-Belanda. Jumlah babakan waktu terbagi menurut aliran politik, antara lain: pertama, politik kolonial kolot; kedua, politik kolonial-progresif; ketiga, politik ekonomi; dan keempat, politik-kebangsaan. Dasar dari aliran-aliran itu adalah pandangan tentang manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu dipandang sebagai apa? Sebagai sesama manusiakah, sebagai makhluk yang “primitif”kah, sebagai manusia yang rendah martabatnya kah? Penulis mengikuti pendapat Rutgers. Rutgers berpendapat bahwa pertama, Indonesia di bawah pemerintahan feodal (sejarah kuno: prasejarah atau protosejarah; pemerintahan feodal raja-raja Hindu; penyiaran agama Islam); kedua, Penguasaan Indonesia oleh Modal Belanda (masa monopoli modal-

dagang VOC; penguasaan langsung oleh Negara Nederland: campur tangan Inggris-Prancis, tanam paksa untuk monopoli Negara, masa modal partikelir Belanda, dan peralihan ke masa Imperialisme). Rutgers meninjau perkembangan sistem penggunaan modal dan cara menghasilkan barang di zaman purba, di zaman raja-raja dan di zaman Belanda.

Tan Malaka melihat sejarah Indonesia sebagai sejarah feodal dari awal sampai akhir. Tan Malaka berpendapat demikian karena pusat perhatiannya adalah rakyat-jembel Indonesia disebut bangsa Indonesia sejati. Sejak zaman apapun rakyat jembel tidak mengenal kemerdekaan akibat faktor penindasan di bawah raja-raja. Penindasan bersifat feodal; penindasan itu kemudian berlanjut masa Belanda berbentuk imperialism modern. Masa “di zaman Hindu”, “zaman Islam” dan “zaman Belanda” penindasan adalah suatu kenyataan. Fenomena dalam Indonesia: pertama, rakyat jembel sebagai kelas terjajah; kedua, Belanda dengan alat-alatnya, yaitu raja-raja, bangsawan dan sebagainya sebagai kelas penjajah. Lukisan Tan Malaka dan Rutgers di atas mengupas kejahatan pengkhianatan raja-raja dan Belanda, dan sebagai konsekuensi buku-buku sebelum 1942 dilarang oleh pemerintah Belanda.⁴

3.3.2. Kemanusiaan Indonesia dalam Konteks Kolonialisme

Menurut Frantz Fanon: kolonialisme banyak diartikan sebagai penonmanusiawian (*dehumanization*) rakyat di daerah koloni. Orang-orang terjajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Warna kulit hitam, coklat atau kuning menunjukkan bahwa rakyat terjajah itu bukan hanya mereka yang kerjanya dirampas, tetapi juga mereka yang dalam jiwanya diciptakan kompleks inferioritas yang diakibatkan oleh kematian dan

⁴ R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005), 170-178

penguburan orisinalitas budaya lokal mereka. Komplek inferioritas ini ditanamkan dalam kesadaran budaya masyarakat koloni.⁵ Pengalaman kemanusiaan bangsa Indonesia dapat ditelusuri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengalaman derita dan kesengsaraan dengan dijajahnya rakyat bumi Nusantara oleh Belanda dan Jepang. Penindasan lahir batin, baik mental, materiil, gangguan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan bagi rakyat bumi pertiwi.

Ciri utama pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak *in natura*, yaitu dalam bentuk hasil pertanian rakyat. Salah satu dampak destruktif dari pelaksanaan tanam paksa adalah timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit meningkatkan angka kematian.⁶ Pelaksanaan tanam paksa lokasi penanaman dari pemukiman menempuh jarak puluhan kilometer. Penduduk di Jawa Tengah rata-rata berkurang 354.000 jiwa. Pengerahan tenaga kerja, dan perlawanan pasif para petani. Selama masa tanam paksa wabah penyakit meningkat akibat dari kondisi fisik penduduk kekurangan makanan dan gizi. Tingkat kesejahteraan penduduk masa tanam paksa, para ahli sosial menggunakan metode pengkalkulasian kebutuhan beras.

Fakta historis perlawanan terjadi di daerah-daerah di Indonesia selama abad ke-19 terhadap sistem kolonial Belanda merupakan perjuangan demi kemanusiaan. Contoh di Jawa, faktor-faktor produksi pertanian, menyangkut tanah maupun tenaga kerja, diatur menurut sistem kolonial. Para petani terbebani mengolah sebagian tanah untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan wajib menyumbangkan tenaga kerja secara paksa pada penguasa kolonial. Di daerah-daerah lain, seperti di Maluku, perdagangan laut merupakan sumber penghidupan pokok penduduk, penguasaan daerah pantai dan tindakan monopolistik perdagangan Belanda, penguasaan daerah produksi tanaman ekspor merupakan hambatan

⁵ Mudji Sutrisno, *Hermeneutika Pascakolonial: Soal Identitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 13.

⁶ Sondarika, Wulan, *Dampak Culturstelsel (tanam paksa) bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830-1870*. *Artefak*. (), 60-64.

besar bagi penduduk setempat untuk memperoleh penghasilan. Tindakan penguasa-penguasa asing menimbulkan rasa antipati bagi penduduk bumiputra, dan menuju ke arah perlawanan-perlawanan. Belanda dalam rangka kolonialisme mendapat reaksi dari daerah-daerah di Indonesia. Reaksi terhadap kekuasaan kolonial Belanda mempunyai saham berharga dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional.⁷

Usaha memonopoli perdagangan cengkeh pada tahun 1620, seorang Belanda bernama Coen pernah membasmi hampir semua penduduk asli pulau Banda, melalui pengusiran, membiarkan mati kelaparan, dan membunuh langsung atau menjadikan mereka budak dalam upaya mengubah tanah mereka menjadi perkebunan Belanda. Hidup ditanah partikelir mendatangkan penderitaan bagi rakyat desa. Rakyat harus melakukan kerja paksa selama lima hari setiap bulan, meronda kampung, dan melakukan tugas-tugas lain untuk kepentingan tuan tanah.⁸ Pada tahun 1829, Gubernur Jenderal Belanda Van Den Bosch menerapkan sistem penanaman (kultur stelsels). Kultur stelsels berlaku sejak tahun 1930 menghapuskan sistem sewa tanah sebagai kesinambungan praktik masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan mengganti dengan suatu sistem setiap desa diberi kewajiban menanam komoditas ekspor tertentu sebagai kepentingan pemerintah kolonial. Kultur stelsels menimbulkan wabah kelaparan dan penyakit di Jawa tahun 1846.⁹

Van Den Bosch menerapkan sistem tanam paksa bertujuan mengembalikan kas keuangan Negara. Pada sistem ini, pungutan terhadap rakyat bukan lagi berupa uang tetapi berupa hasil bumi nilai ekspor. Usaha memperlancar pungutan, rakyat wajib menanam seperlima, sepertiga, bahkan setengah dari luas tanahnya dengan tanaman sesuai pasaran

⁷ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 155.

⁸ M. Junaedi Al Anshori, *Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan* (Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 2010), 72.

⁹ Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 68-69.

dunia. Tugas-tugas rakyat secara paksa terbagi menjadi beberapa bagian yaitu menggarap, menanam, memanen, dan mengangkut ke pabrik. Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak penyimpangan memberatkan rakyat. Penyediaan tanah untuk tanaman ekspor melebihi dari ketentuan. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani. Tenaga rakyat berlangsung untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti membuat jalan-jalan, saluran air dan jembatan. Pada saat pelaksanaan tanam paksa, kesejahteraan rakyat terampas serta menyebabkan bahaya kelaparan karena gagal panen mengakibatkan kematian beribu-ribu penduduk Nusantara. Contoh gagal panen, pada tahun 1843 ribuan keluarga di Cirebon mengungsi. Tragedi serupa terjadi di Demak pada tahun 1848, di mana angka kematian mencapai 216.000 jiwa, dan pada tahun 1849 di Grobogan mencapai 80.500 jiwa.¹⁰

Pengaruh kebudayaan Eropa seperti realita jiwa konsumtif melanda masyarakat pedesaan, dan muncul ketegangan sosial di semua lapisan masyarakat. Pemberontakan dan perlawanan fisik terjadi di berbagai wilayah jajahan Hindia Belanda antara lain perlawanan rakyat Maluku tahun 1817 di bawah pimpinan Pattimura. Pemberontakan Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825, dan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat oleh tuanku Imam Bonjol pada tahun 1871. Pemberontakan terjadi di daerah lain seperti di Banjarmasin, Pontianak, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok, dan Aceh. Perlawanan oleh berbagai kelompok masyarakat karena bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa proses kolonialisasi adalah suatu proses pemaksaan dan penindasan pada tatanan sosial-budaya. Akibat proses pemaksaan dalam tatanan sosial masyarakat pribumi tradisional, timbul perlawanan secara kontinuitas.¹¹

¹⁰ Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal, 1740: Tragedi berdarah Angke* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), 185.

¹¹ Agus Sachari, *Budaya Visual Indonesia: membaca makna perkembangan gaya visual karya desain di Indonesia abad ke-20* (Jakarta: Erlangga, 2007), 50.

3.4. KEMANUSIAAN PANCASILA PERSPEKTIF SUKARNO (1901-1970)

A. Konteks Keluarga dan Pendidikan

Sukarno lahir di Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Ayah bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, dan ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai kelahiran Sinagaraja, Bali. Pada usia 14 tahun, Sukarno tinggal bersama Haji Oemar Said Tjokroaminoto di Surabaya dan sekolah di Hoogere Burger School (HBS). Di Surabaya, Soekarno bergabung dengan organisasi Jong Java (pemuda Jawa). Beliau tamat dari HBS pada tahun 1920, dan melanjutkan pendidikan ke Technische Hogeschool di Bandung, dan lulus pada tahun 1925. Di Bandung, Soekarno bersama Sartono, Anwari, Sunario dan sahabat lainnya mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia). Pada tahun 1930 Soekarno ditahan pemerintah kolonial Belanda dan dihukum empat tahun penjara di Sukamiskin, Bandung. Pada 31 Desember 1931 Soekarno dibebaskan dengan alasan pembelaan Soekarno. Pada tahun 1933 Soekarno diasingkan ke Ende, Flores, dan pada tahun 1938 beliau dipindahkan ke Bengkulu.¹² Sukarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta.

B. Konteks Sosial dan Politik

Periode ekspansi perdagangan di Asia Tenggara abad 17 dan 18 sebagai titik-tolak konteks sosial politik masa Sukarno. Ekspansi orang-orang Eropa menimbulkan ketidakamanan dan konflik di antara pedagang Eropa dan penduduk asli. Konteks Hindia-Belanda abad 19 menandai kembali ruang sosial politik contoh di Jawa berfungsi mengamankan otoritas kekuasaan kolonial dan akses pemcarian sumber daya. Belanda

¹² Taufik Adi Susilo, *SEOKARNO Biografi Singkat 1901-1970* (Yogyakarta: Garasi, 2008), 13-58.

melihat kontrol teritorial sebagai perluasan keuntungan, jangkauan dan volume produksi tanah jajahan. Produktivitas sebagai tujuan melalui penaklukan ruang, tanah, dan penduduk. Determinasi otoritas kolonial Belanda mewujudkan pemerintahan fisik, kodifikasi, klasifikasi, dan pengendalian ruang dalam memerintah Jawa. Sejarahwan apologis era kolonial, seperti Arnold De Kat Angelino, berpendapat bahwa kebijakan dan praktik kolonial abad ke-19 merupakan bukti meningkatnya kesadaran dan kewajiban moral terhadap penduduk jajahan, dan kapitalisme mengalami perubahan bentuk, intensitas, jangkauan global.¹³

C. Ide Kemanusiaan Sukarno

Kumpulan tulisan Sukarno pada periode tahun 1920-1950, antara lain: *Nasionalisme, Islamisme, & Marxisme* (1926); *Indonesia Menggugat* (1930); *Mencapai Indonesia Merdeka* (1933); *Kepada Bangsa* (1947); dan *Konsepsi Presiden* (1957). Penulis dalam menggali ide kemanusiaan Sukarno memanfaatkan beberapa sumber buku primer, yaitu *Di Bawah Bendera Revolusi* (jilid 1), Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1963. Jumlah tulisan Sukarno dalam buku ini sebanyak enam puluh satu tulisan sebelum proklamasi kemerdekaan. Kumpulan tulisan mencerminkan perhatian Sukarno terhadap masalah politik, agama, tanah air, dan internasional. Beberapa tulisan termuat dalam media massa, antara lain: *Soeloeh Indonesia Moeda* dan *Fikiran Ra'jat*. Penulis memahami ide kemanusiaan Sukarno berada pada tiga tema, yaitu pertama, kemanusiaan dalam konsep *freiheit*; kedua, kemanusiaan dalam religius etik, dan ketiga, kemanusiaan dalam sosio-nasionalisme.

¹³ Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000), 59-60.

C. 1. Kemanusiaan dalam Dimensi Intelektual dan Konsep *'freiheit'*

Konsep Sukarno tentang fase perkembangan pengetahuan masyarakat menggunakan tiga istilah Belanda, yaitu: *voogd* (orangtua; wali), *ontvoogden* (bebas), *ontvoogding* (emansipasi). Penelitian Sukarno khusus fase masyarakat Indonesia konteks kolonialisasi. Wali tertuju pada Pihak Penguasa atau pemerintahan Belanda; bebas dan emansipasi tertuju pada bentuk cita-cita masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai anak pada usia-usia sebelum remaja minim pengetahuan dan belum dewasa (perkembangan hormon). Pada perkembangan usia dewasa masyarakat Indonesia bertambah pengetahuan dan keyakinan. Dasar perkembangan pengetahuan menjadi ruang kesadaran masyarakat memandang motif kebijakan penguasa. Sukarno mengikuti pendapat Gustav Klemm (1802-1867) dan Dietrich Schäfer (1845-1929) dalam tulisan:

“zaman teori kuno, jang mengatakan, bahwa “siapa jang ada dibawah, harus terimansenang, jang ia anggap tjukup-harga duduk dalam perbendaharaan riwayat, jang barang kemas-kemasnja berguna untuk memelihara siapa jang berdiri lagi hidup”. Kini sudahlah tak mendapat penganggapan lagi oleh rakjat-rakjat Asia itu. Pun makin lama makin tipislah kepertjajaan rakjat-rakjat itu, bahwa rakjat-rakjat jang mempertuankannja itu sebagai “voogd” jang kelak kemudian hari akan “ontvoogden” mereka; makin lama makin tipislah kepertjajaan, bahwa rakjat-rakjat jang mempertuankannja itu ada sebagai “saudara tua”, jang dengan kemauan sendiri akan melepaskan mereka. Bilamana mereka sudah “dewasa”, “akil-balig” atau “masak”. Sebab tipisnja kepertjajaan itu adalah bersendi pengetahuan, bersendi kejakinan bahwa jang menyebabkan kolonialisasi itu bukanlah keinginan pada kemasjuran, bukan keinginan melihat dunia-asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakjat jang mendjalankan kolonialisasi itu ada terlampau sesak oleh banjaknja penduduk...sebagai jang telah diadjarkan oleh Gustav Klemm-, akan tetapi asalnja kolonialisasi jalah teristimewa soal rezeki. “jang pertama-tama menjebabkan kolonialisasi jalah hamper selamanja kekurangan bekal-hidup dalam tanah-airnja sendiri”, begitulah Dietrich Schafer berkata. Kekurangan rezeki, itulah jang mendjadi sebab rakjat-rakjat Eropah mentjari rezeki dinegeri lain!”¹⁴

Gustav Klemm (1802-1867) pertama mempublikasikan tulisan tahun 1843: *Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit (General History of Human Culture)*, dan

¹⁴ Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* (Jakarta), 1

sepuluh volume tahun 1853. Klemm memiliki konsep tiga fase perkembangan masyarakat (*development of human society*): kebiadaban atau masyarakat liar (*savagery; wildheit*), perbudakan (*bondage; zahmheit*), dan kebebasan (*freedom; freiheit*).¹⁵ Dietrich Schäfer (1845-1929), konsep diametrikal dunia: argumen pertama Schäfer mengemukakan bahwa dunia adalah sebagai sejarah dunia nyata (*real world history*) dan argumen kedua dunia adalah kecil (*the world is small*). Relevansi sejarah dunia berada pada politik imperial, dan kolonialisasi.¹⁶

Konsep '*freiheit*' dalam ide kemanusiaan Sukarno memiliki pengertian bahwa di suatu masa manusia secara sadar atau tidak sadar akan mengalami kebebasan. Contoh kebebasan yang dimaksud Sukarno seperti pembahasan di atas melalui bangsa Indonesia mengalami suatu masa kebebasan atas Belanda. Kebebasan di sini menurut Sukarno tidak terlepas dari faktor dimensi Intelektual masyarakat Indonesia masa itu yang mengalami perkembangan. Hubungan antara dimensi intelektual dan konsep '*freiheit*' adalah kerangka kontinuitas dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

C. 2. Kemanusiaan dalam Religius Etik

Konsep Kemanusiaan Sukarno dalam dua Tulisan: *Bloedtransfusie dan sebagian kaum ulama: bagaimanakah Oollogethek Islami?* Dan *Sekali lagi Bloedtransfusie* (Bengkulu, 20 Juli 1941). Kedua tulisan Sukarno di atas sebagai reaksi soal halal dan haram mendermakan darah dalam rapat MIAI-Pleno dan Kongres Muslimin Indonesia yang ke III di Solo pada tanggal 7-8 Juli 1941. Tanggapan Sukarno atas pandangan ulama Islam sebagai pihak mengharamkan donor darah, yaitu:

¹⁵ Gérald Gaillard, *The Routledge Dictionary of Anthropologists* (London: Routledge, 2004), 12.

¹⁶ Larry Eugene Jones (ed), *Crossing Boundaries* (New York: Berghahn Books, 2001), 246.

“kalau saya menyediakan saya punya darah buat diambil oleh bloedtransfusie itu, maka saya yakin menurut jejak ethieknya Islam. Saya dermakan saya punya darah dengan mengucapkan suka syukur alhamdulillah kepada Allah, bahwa Dia memperkenankan saya menolong sesama manusia yang luka parah. Mungkin darahku itu akan masuk ke dalam tubuhnya orang Belanda, atau orang Indonesia, atau orang lain-lain, atau orang Inggeris atau orang Jerman, atau orang Italia, orang Islam atau orang Nasrani, orang beragama atau orang kafir, orang pencinta Allah atau orang durhaka yang memaki-maki kepada Allah karena lukanya itu, akh, adakah Islam melarang manusia meskipun ia tidak dari agama Islam, atau tidak beragama samasekali? Bahkan meskipun umpamanya darahku itu matuk ke dalam tubuhnya orang kafir, orang pendurhaka, orang musuh, tetapi saya yakin itu satu pertolongan yang terpuji, walaupun pertolongan yang remeh seremeh-remehnyapun juga”.¹⁷

Sukarno mengoreksi hukum dan dalil-dalil Islam yang memandang donor darah di luar Islam sebagai hukum haram:

“Dan apakah yang musti saya katakan atas itu alasan, yang mengatakan haram memasukkan darah seorang Muslim “yang suci” ke dalam tubuhnya seorang bukan Muslim “yang tidak suci”, atau memasukkan darah seorang kafir “yang tidak suci” ke dalam tubuhnya seorang Muslim “yang tentu suci”? Dan manakah ini mengambil dalil “suci” dan “tidak suci”, dan dari manakah mengambil alasan hukum haram pemasukan yang satu kepada yang lain. Dan bahwa Qur’an mengatakan orang Musyrikin najis? Benar Qur’an ada mengatakan begitu, tetapi najis apanya? Najis tubuhnyakah? Najis darahnyakah? Tidak! Yang dikatakan oleh Qur’an najis, ialah najis fahamnya, najis iktikadnya, najis fikirannya, najis “agamanya”. Sebab mereka kaum Musyrikin sekonyong-konyong tidak dianggap lagi najis, manakala mereka mengucapkan iman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Mereka sekonyong-konyong tidak lagi najis, manakala fahamnya, kepercayaannya, agamanya berganti, dari syirik kepada Islam. Dan tentang darah yang mengalir di dalam tubuh mereka darah itu tidak najis, tidak kotor, tidak suci, selama darah itu belum menjadi “kotoran”; yang demikian itulah najis, tetapi janganlah lupa juga akan hukum, bahwa darahnya orang Islam juga menjadi najis, manakala dari darah orang Islam itu melekat menjadi “kotoran” di kulit atau di pakaian kita.

“Darah kotor” yang demikian itulah najis, tetapi jangan lupa juga akan hukum, bahwa darah yang asalnya dari orang kafir maupun darah yang asalnya dari orang beragama, baik darahnya orang yang anti Tuhan, maupun darahnya orang yang sembahyang seratus kali tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam! Maka oleh karena itu, manakala kita membawa dalil ayat Qur’an yang mengatakan orang Musyrik itu najis, maka dalil itu tidaklah bisa dipakai buat mengganti kepada bloedtransfusie bukan faham kemusyrikan, bukan agama kemusyrikan, yang memang itulah kotor dan najis! Tetapi darah, dan darah yang ditransfusiekan itu bukan

¹⁷ Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi Jilid I* (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1963), 501.

“darah kotoran” yang telah tercampak di tanah atau di mana sahaja yang mengasih sifat “kotoran” kepadanya; darah yang ditransfusiekan itu adalah plasma hidup yang bersih dan yang murni.

Darah yang ditransfusiekan itu bukan buat membuat kotor, tetapi buat menyambung jiwa orang yang celaka haibat dan terancam bahaya maut. Daging babi nyata haram dimakannya, alkohol dan candu nyata haram diminumnya, tetapi daging babi dan alkohol dan candu itu hilang samasekali keharamannya, manakala perlu dimakan atau diminum buat menyambung jiwa! Tiap-tiap perkara itu asal hukumnya “boleh” alias “harus”, perkara itu baru menjadi perkara haram atau makruh, perkara wajib atau sunnat, setelah memeriksa kepada ilat-ilatnya”.¹⁸

Religius etik Sukarno bahwa agama khusus Islam melalui hukum dan dalil dalam ayat suci cenderung berfungsi menolong sesama manusia. Istilah Sukarno “penyambung jiwa” sebagai tugas manusia. Sukarno menjelaskan prinsip transfusi darah dan melihat bahwa masyarakat Islam di Indonesia masih berbeda dengan masyarakat Islam di negeri-negeri lain, seperti Turki dan Mesir telah melakukan transfusi darah. Sukarno berharap MIAI-Pleno dan Kongres Muslimin Indonesia akan menentukan hukum “halal” atas transfusi darah. Sebagian ulama masih berpendapat bahwa transfusi darah haram, tetapi Sukarno berkata bahwa Islam tidak kejam, dan mengoreksi *oorlogsethiek* (etika perang). Etika perang Islam halus dan menjunjung tinggi kemanusiaan, dan demikian dengan transfusi darah selaras dengan etika Islam, yaitu menolong sesama manusia yang sedang membutuhkan atau celaka, sehingga tindakan ini dapat membawa pertolongan atau menjadi cara sebagai penyambung jiwa.

C. 3. Kemanusiaan dalam Sosio-Nasionalisme

Pancasila lahir dalam sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoozakai* (Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia: BPUPKI). Sukarno sebagai perumus Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945, berisikan kelima prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau

¹⁸ Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Ibid., 502.

perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹ Kelima prinsip berasal dari prinsip “gotong-royong”. Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 Sukarno menawarkan alternatif Pancasila dari lima prinsip menjadi tiga prinsip yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, dari tiga prinsip menjadi satu prinsip yaitu gotong royong. Gotong royong bagi Sukarno sebagai nafas rakyat Indonesia dalam perjuangan.

Penulis mengikuti pendapat P. J. Suwarno, bahwa Pancasila terbagi ke dalam dua pemahaman, yaitu Pancasila formal dan Pancasila Material. Pancasila formal berupa pengertian abstrak dari ide tokoh-tokoh perumus Pancasila tertuang dalam dokumen-dokumen. Pancasila material berasal dalam sejarah, peradaban, agama, hidup ketatanegaraan, dan lembaga sosial (struktur sosial asli Indonesia bersifat gotong-royong). Pancasila material berkembang sebagai hasil pembudayaan masyarakat Nusantara mulai tahun 400 Masehi sampai tahun 1945. Pancasila berada dalam proses dari Pancasila material kepada Pancasila formal. Proses faktual dan rasional berhubungan dengan waktu, tokoh-tokoh, dan situasi lingkungan sosial politik.²⁰

Konsep kemanusiaan Sukarno dalam Pancasila perspektif penulis berada pada lingkaran konsep sosio-nasionalisme: “sosio-nasionalisme adalah nasionalisme marhaen, dan menolak tiap tindak borjuisme yang menjadi sebabnya kepincangan masyarakat itu. Jadi sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan rezeki”²¹

Pemikiran nasionalisme Ernest Renan (1882) mempengaruhi pemikiran nasionalisme Sukarno. Konsep sosio-nasionalisme, Sukarno perkenalkan dalam tulisan di surat kabar

¹⁹ Sukarno, “Lahirnya Pancasila” dalam *Pancasila dan Perdamaian Dunia* (Jakarta: Idayu Press, 1985), 19.

²⁰ P. J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 11-13.

²¹ Sukarno, *Indonesia Menggugat* (Jakarta: S.K. Seno, 1956), 175.

"Fikiran Rajat" tahun 1932. Sosio-nasionalisme Sukarno mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat memiliki ikatan perasaan atas dasar persamaan nasib. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme berperikemanusiaan, dan memiliki aspek internasionalisme universal.

D. Ide Pancasila Sukarno

Penulis dalam menggali ide Pancasila Sukarno memanfaatkan beberapa sumber buku primer, yaitu *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998. Pancasila Sebagai Dasar Negara; Buku kumpulan tulisan Sukarno dalam kursus tentang Pancasila tahun 1958. Buku ini dilampiri pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI yang diberi nama Lahirnya Pancasila. Penulis memahami ide Pancasila Sukarno berada pada dua tema, yaitu pertama, Pancasila 1 Juni 1945; kedua, Pancasila sebagai alat pemersatu.

D. 1. Pancasila 1 Juni 1945

Lima butir Sila pemaparan Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 sebagai jawaban permintaan ketua sidang BPUPKI tentang *philosophische grond-slag*, yaitu: 1. **Kebangsaan Indonesia** berarti sebuah dasar "hendak mendirikan sebuah negara, 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang untuk satu orang, bukan satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi 'semua buat semua'". 2. **Perikemanusiaan/internasionalisme** "Kebangsaan bukanlah kebangsaan menyendiri, bukan chauvinisme, menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia, dan menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa". 3.

Mufakat/Demokrasi Dasar itu ialah dasar mufakat. Mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu"... "syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. 4. **Kesejahteraan Sosial** "mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya".

5. **Ketuhanan yang berkebudayaan.** Prinsip yang kelima hendaknya: "Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa... Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri... Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama"...bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain".²²

Lima Sila menurut pemaparan Sukarno dapat memerinci menjadi tiga sila atau *trisula*:

"atau barangkali ada saudara-sudara yang tidak suka dengan bilangan lima? Saya boleh peras lagi, sehingga tinggal 3 saja...saya namakan sociodemokrasi...socio-nationalisme...ketuhanan. Tetapi barangkali tidak semua tuantuan senang pada trisula ini dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan menjadi satu. Apakah yang satu itu? Semua buat semua...yaitu perkataan gotong royong..".²³

²² Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, tim penyunting, kata pengantar oleh Taufik Abdullah, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei-22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 92-101.

²³ *Ibid.*, 102.

Pancasila (lima sila) oleh Sukarno memerinci menjadi tiga (trisula), yaitu: 1. **Sosio-Nasionalisme** (*Socio-nationalisme*) 2. **Sosio-Demokrasi** (*Socio-democratie*) 3. **Ketuhanan yang berkebudayaan**. Sila kebangsaan dan Internasionalisme terperinci menjadi *socionationalisme*, sila mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial terperinci menjadi *sociodemocratie* dan sila ketuhanan yang berkebudayaan. Trisula terperinci menjadi Ekasila yaitu “Gotong Royong”. Sukarno mengatakan bahwa susunan atau urutan sila-sila lima dari pancasila itu bersifat urutan kebiasaan saja alias bukan urutan prioritas dan menganggap urutan-urutan itu tidak prinsipil. Sila dalam pancasila merupakan satu-kesatuan integral yang saling mengunci, saling kait-mengkait, dan saling mengandaikan.

D. 2. Pancasila sebagai Alat Pemersatu (*weltanschauung*)

Pancasila sebagai alat pemersatu merupakan pandangan Sukarno, demikian: “Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu.”

“Saudara mengerti dan mengetahui, bahwa Pancasila adalah saya anggap sebagai Dasar daripada negara Republik Indonesia. Atau dengan bahasa Jerman: satu *weltanschauung* di atas mana kita meletakkan Negara Republik Indonesia itu. Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu-padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit-penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, Imperialisme. Perjuangan sesuatu bangsa, perjuangan melawan Imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendirisendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri.

Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya”.²⁴

Penulis memahami tujuan Sukarno menyebut Pancasila sebagai alat pemersatu sebagai upaya merasionalisasikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan.



²⁴ Soekarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984), 1-3.